

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan salah satu aset paling penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Kualitas lingkungan mencerminkan kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung kehidupan, memberikan sumber daya, serta menjaga keseimbangan alam bagi generasi sekarang dan mendatang. Kualitas lingkungan yang baik memungkinkan masyarakat memperoleh udara bersih, air layak konsumsi, tanah subur, serta biodiversitas yang terjaga. Namun, seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk, kualitas lingkungan di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia, mengalami tekanan yang signifikan. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya pencemaran air, udara, dan tanah, berkurangnya tutupan hutan, serta meningkatnya kejadian bencana ekologis, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan (Christanto, 2014).

Kualitas lingkungan dapat dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu faktor alamiah dan aktivitas manusia. Secara alamiah, kondisi geografi dan iklim suatu daerah menentukan daya dukung lingkungannya. Namun, dalam beberapa periode terakhir, aktivitas manusia menjadi faktor dominan yang mempercepat degradasi lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang masif untuk kepentingan pembangunan ekonomi, perluasan lahan pertanian, urbanisasi, dan industrialisasi telah mengubah keseimbangan ekosistem (Tarolli et al., 2019). Dampak dari perubahan tersebut meliputi pencemaran air akibat limbah domestik dan industri,

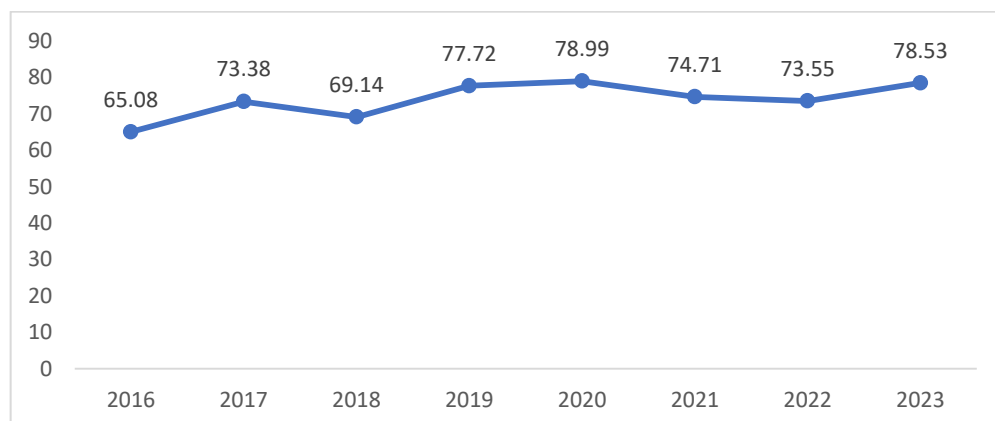
penurunan kualitas udara karena emisi kendaraan dan pabrik, serta kerusakan tanah akibat deforestasi dan penggunaan bahan kimia berlebihan dalam pertanian.

Pengukuran kualitas lingkungan menjadi penting untuk memantau kondisi ekosistem dan merumuskan kebijakan yang tepat. Beberapa indikator umum yang digunakan untuk menilai kualitas lingkungan antara lain Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang mencakup indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks tutupan lahan. Indeks kualitas air sering dijadikan ukuran utama karena air merupakan sumber daya vital yang langsung memengaruhi kesehatan manusia, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem. Indeks kualitas air mencerminkan kondisi fisik, kimia, dan biologi dari air suatu wilayah. Parameter yang diukur meliputi kadar oksigen terlarut (DO), pH, konsentrasi bahan pencemar, tingkat kekeruhan, serta kandungan logam berat dan mikroorganisme berbahaya. Tingginya angka indeks kualitas air menunjukkan air dalam kondisi baik dan layak digunakan, sedangkan rendahnya indeks menunjukkan tingkat pencemaran yang tinggi dan risiko lingkungan yang serius (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa pengukuran Ketercapaian pembangunan lingkungan diukur menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan Indeks pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja pengelolaan dan kinerja perlindungan lingkungan Hidup. Di dalam melakukan perhitungan Indeks Kalitas Lingkungan Hidup (IKLH) menggunakan

tiga komponen utama, yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Kualitas lingkungan di berbagai provinsi di Indonesia menunjukkan kondisi yang beragam, tergantung pada tingkat pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan lingkungan, dan tekanan dari aktivitas manusia. Beberapa provinsi mampu mempertahankan kualitas lingkungannya dengan pengelolaan yang berkelanjutan, sementara yang lain menghadapi penurunan akibat eksploitasi berlebihan dan pertumbuhan penduduk yang cepat. Salah satu provinsi yang memiliki tantangan besar dalam menjaga kualitas lingkungan adalah Provinsi Aceh. Wilayah ini dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, seperti hutan tropis, pegunungan, dan sumber daya air yang signifikan. Namun, tekanan terhadap ekosistem di Aceh semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk yang pesat dan meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya alam. Berikut perkembangan indeks kualitas lingkungan di provinsi Aceh selama periode 2016 sampai 2023 yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1
Indeks kualitas Lingkungan di Provinsi Aceh (Persen) 2016-2023
 Sumber : Badan Pusat Statistik, (2025)

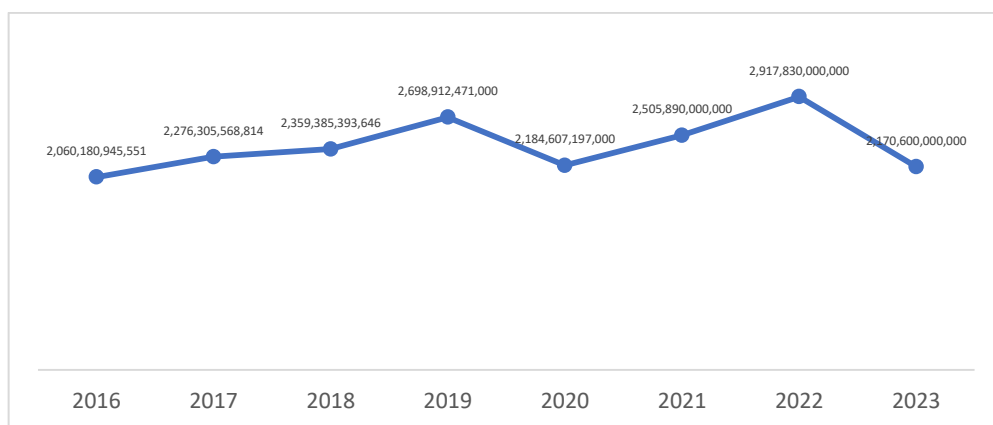
Berdasarkan Gambar 1.1 di atas nilai Indeks Kualitas Lingkungan di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga 2023. Pada tahun 2016, indeks tercatat sebesar 65,08, kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 73,38. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 69,14, lalu kembali naik pada tahun 2019 menjadi 77,72 dan terus meningkat pada tahun 2020 menjadi 78,99. Pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 74,71, dan kembali turun pada tahun 2022 menjadi 73,55, namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 78,53.

Naik turunnya kualitas lingkungan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan semakin tinggi, serta pengelolaan pembangunan yang belum optimal. Di sisi lain, tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang fluktuatif memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program-program pengelolaan lingkungan, seperti pengendalian pencemaran, rehabilitasi lahan, dan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan. Ketika PAD meningkat dan dikelola secara efektif, pemerintah daerah memiliki kapasitas lebih besar untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Sebaliknya, jika pertumbuhan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang memadai, maka kualitas lingkungan cenderung menurun (KHLK, 2025).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai

pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya. PAD diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Di banyak daerah, termasuk Aceh, peningkatan PAD sering kali bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam, seperti sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Jika tidak dikelola secara bijaksana, aktivitas ekonomi yang meningkatkan PAD ini dapat berdampak negatif terhadap daya dukung lingkungan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh sebagian besar diperoleh dari kegiatan ekstraktif, seperti pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan. Apabila peningkatan PAD tidak diimbangi dengan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, hal ini dapat memicu penurunan kualitas lingkungan, termasuk menurunnya indeks kualitas air, dan pada akhirnya berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Berikut perkembangan pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh selama periode 2013 sampai 2023 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.2 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh (Rupiah) Tahun 2013-2023
Sumber : Badan Pusat Statistik, (2025)

Berdasarkan Grafik 1.2 di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Aceh pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp2.060.180.945.551. Pada tahun 2017 PAD meningkat menjadi Rp2.276.305.568.814, dan pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp2.359.385.393.646. Selanjutnya, pada tahun 2019 PAD naik signifikan menjadi Rp2.698.912.471.000. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp2.184.607.197.000, lalu kembali naik pada tahun 2021 menjadi Rp2.505.890.000.000 dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi Rp2.917.830.000.000. Pada tahun 2023 PAD kembali menurun menjadi Rp2.170.600.000.000.

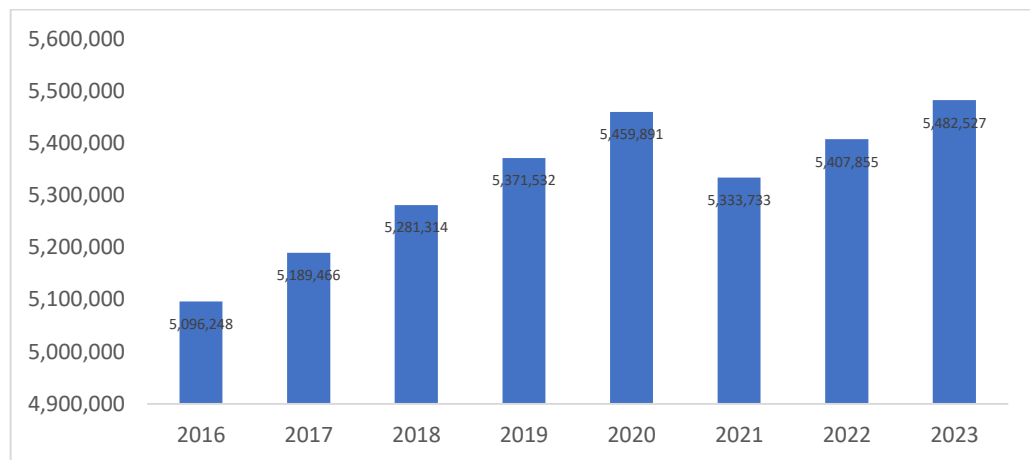
Alokasi anggaran untuk perlindungan lingkungan berhubungan positif dengan kualitas lingkungan hidup Selain itu, peningkatan pendapatan berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan, menunjukkan perlunya kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi ini (Kurniawan & Wibowo, 2021).

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menggunakan dana tersebut untuk menerapkan anggaran berbasis lingkungan hidup sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 45 ayat 1 untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta 12 program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Kemudian dalam pasal 46 juga disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup yang telah mengalami pencemaran atau kerusakan.

Selanjutnya kualitas lingkungan juga ditentukan oleh jumlah penduduk. jumlah penduduk yang terus bertambah memberikan tekanan tambahan pada daya dukung lingkungan, meningkatkan kebutuhan akan lahan, air bersih, energi, dan infrastruktur. Pertumbuhan penduduk juga mendorong peningkatan volume limbah domestik dan industri yang dapat mempercepat degradasi kualitas air. Kualitas air dapat menurun akibat peningkatan limbah rumah tangga terutama pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, maka akan membawa akibat kepada tekanan yang kuat terhadap sumber daya alam. Seperti meningkatnya kebutuhan pangan, air bersih, pemukiman dan sebagainya. Sehingga ,menimbulkan ketidakseimbangan antara persediaan sumber daya alam dengan kebutuhan manusia.

Kehidupan manusia tidak lepas dari alam. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, manusia melakukan eksploitasi yang mendorong peningkatan kebutuhan akan lahan untuk pemukiman serta sumber daya alam. Ketidakseimbangan antara pertambahan penduduk dan peningkatan produksi pangan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Namun, eksploitasi alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kondisi alam itu sendiri akan membawa malapetaka terhadap kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk khususnya di Provinsi Aceh seperti pada gambar 1.2.



Gambar 1.2
Jumlah Penduduk Provinsi Aceh tahun 2016-2023
 Sumber : Badan Pusat Statistik, (2025)

Setiap provinsi memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, dan setiap daerah juga memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat beragam. Berdasarkan data dari BPS Aceh jumlah penduduk di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi, yang dimana pada akhir tahun 2019 jumlah penduduk di provinsi aceh mencapai 5.371.532 jiwa kemudian pada tahun 2020 jumlah penduduk meningkat sebesar 5.459.891 jiwa yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti migrasi penduduk, dan dinas kependudukan serta pencatatan sipil melakukan verifikasi data anomalia kependudukan yang berkaitan dengan kematian, perpindahan penduduk dan pemutakhiran data yang tidak dilaporkan Kemudian pada tahun 2023 jumlah penduduk di provinsi Aceh mengalami peningkatan dikarenakan adanya penambahan penduduk yang baru lahir yang melaporkan kelahiran sehingga terjadinya peningkatan penduduk di tahun 2022 dan adanya penambahan penduduk luar yang masuk ke Aceh (Syarbaini, 2022).

Penelitian sebelumnya oleh Ito (2005), Liyanage dan Yamada (2017), (Peacock, 2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki dampak

negatif signifikan terhadap kualitas air. Namun, penelitian sebelumnya belum mengkaji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kualitas lingkungan.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menghubungkan secara simultan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan jumlah penduduk terhadap kualitas lingkungan. Studi ini tidak hanya mengkaji hubungan tersebut secara umum, tetapi juga secara khusus dilakukan di Provinsi Aceh, yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan provinsi lain di Indonesia, baik dari segi geografis, sosial, maupun kebijakan fiskal. Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dalam pengelolaan anggaran daerah serta dinamika demografis yang khas, sehingga temuan dari daerah ini dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual dan relevan dalam menyusun strategi pengelolaan lingkungan berbasis daerah.

Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi sejauh mana PAD dapat dimanfaatkan untuk mitigasi dampak negatif terhadap lingkungan, sebuah topik yang masih jarang dibahas dalam literatur sebelumnya. Dengan fokus pada Provinsi Aceh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus memperkaya kajian ilmiah dalam bidang ekonomi lingkungan dan tata kelola keuangan daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian hubungan antara pertumbuhan penduduk dan penurunan kualitas lingkungan. Misalnya, penelitian oleh Nurhayani et al. (2024) dan Akhirul (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap kualitas lingkungan. Sementara itu,

penelitian Sari (2023) juga mengkaji pengaruh jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap kualitas lingkungan. Namun penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menelaah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kualitas lingkungan. Selain itu, belum ada penelitian yang mengkaji penelitian di wilayah Provinsi Aceh, yang memiliki karakteristik ekonomi dan lingkungan yang berbeda dibanding daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Jumlah Penduduk Terhadap Kualitas Lingkungan di Provinsi Aceh”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kualitas lingkungan di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kualitas Lingkungan hidup di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Jumlah Penduduk terhadap Kualitas Lingkungan hidup di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kualitas lingkungan di Provinsi Aceh.

2. Mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kualitas Lingkungan di Provinsi Aceh.
3. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Jumlah Penduduk secara simultan terhadap Kualitas Lingkungan hidup di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Sebagai kontribusi ilmiah, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, jumlah penduduk, dan kualitas lingkungan, khususnya dalam bidang ekonomi dan pembangunan daerah.
2. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, temuan dari studi ini dapat dijadikan dasar atau rujukan bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa, terutama di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini bisa menambah khasanah informasi dan khususnya pengetahuan tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Jumlah Penduduk Terhadap Kualitas Lingkungan di Provinsi Aceh” serta sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pembelajaran serta menambah wawasan baru bagi penulis, serta menambah wawasan terhadap permasalahan yang akan penulis teliti.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Aceh dalam menyusun kebijakan yang memadukan aspek ekonomi dan lingkungan, khususnya dalam pemanfaatan PAD untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.